

**ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh:

LIZI VIRMA SURIANTI

06096041



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**





No. Alumni Univesitas

Lizi Virma Surianti

No. Alumni Fakultas

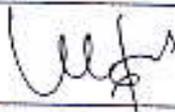
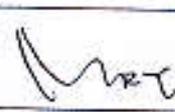
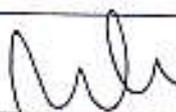
a). Tempat/Tanggal Lahir : Cupak, 04 Oktober 1987 b) Nama Orang Tua: Syahrudin (alm) dan Ramaina c) Jurusan : Akuntansi d) Program studi : Akuntansi Pemerintahan e) NBP : 06096041 f) Tgl Lulus: 28 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,66 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat Orang Tua: Jl. Lintas Sumatera No. 117 Dusun Baru Kec. Gunung Talang Kab. Solok Sumatera Barat.

Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Hubungannya dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)
Tugas Akhir DIV oleh Lizi Virma Surianti, Pembimbing 1. Wwik Andriani, SE, Ak. 2. Zahara, SE, M. Ak, Ak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatan waktu merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada seluruh kepala dan staf subbagian akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan yang memudahkan dalam menginterpretasikan hasil analisis lebih lanjut. Salah satu caranya dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan responden agar dapat diketahui secara keseluruhan berdasarkan karakteristiknya. Hasil analisis kapasitas sumber daya manusia pemerintah Daerah Kabupaten Solok belum memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatan waktu. Hal ini dikarenakan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi dan belum jelasnya *job description*. Dan rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data hingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena teknologi informasinya (berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sistem akuntansi) belum dapat serta belum dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Disetujui telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 28 Juli 2009
Penguji telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Nurul Fauzi, SE, MM, Ak	Ulfi Maryati, SE, M. Ak, Ak	Anda Dwi Haryadi, SE, Ak.	Wwik Andriani, SE, Ak

Disetujui:

Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak
Nama



Tanda Tangan

Penyusun telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Alumni Fakultas:	Nama	Petugas Fakultas/ Universitas	Tanda Tangan
Alumni Universitas:	Nama		Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dengan pesat. Indonesia sebagai negara yang berkembang, memerlukan dukungan dari semua pihak. Kesuksesan penerapan akuntansi pemerintahan di daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak yang ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas pada awalnya diartikan sebagai pertanggungjawaban atas segala tindakan seseorang (raja/lembaga) kepada yang memberi wewenang atau wangsit kepadanya (LAN dan BPKP : 2000 dalam Halim, 2004). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik, di mana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya : 2000 dalam Halim, 2004).

Lebih lanjut terminologi akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Dalam hal tersebut maka akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (LAN dan BPKP : 2000 dalam Halim, 2004). Tindak

tanduk dan kegiatan banyak jenisnya, sehingga terdapat jenis akuntabilitas. Jenis akuntabilitas antara lain adalah akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP : 2000 dalam Halim, 2004). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Premchand (2003) bahwa *the main instruments of financial accountability are government budgets, periodically published data on public finances, annual accounts, and the investigative and other general reports prepared by independent agencies*. Karena dana atau uang yang dikelola oleh pemerintah harus terbuka kepada rakyat menjadi lebih besar maka masyarakat lebih tertarik dan merasa ikut mengawasi berjalannya sistem akuntabilitas keuangan. Dari uraian ringkas di atas dapat dipahami dan dikenali bahwa akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Harus disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Informasi yang digunakan harus bermanfaat dan mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan

keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari (PP No. 24 Tahun 2005): (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia sangat penting untuk dibahas lebih dalam agar pelaporan keuangan pemerintah lebih baik untuk masa yang akan datang. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Serta beberapa buah tulisan dari berbagai media massa dan internet tentang laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Sari (Magister Manajemen USU, Class XXI-2) Sari mengutip permasalahan ini dari berbagai sumber dan menyimpulkan bahwa beberapa laporan keuangan daerah mengalami penyimpangan anggaran, antara lain dalam pemberian tunjangan, insentif, bantuan keuangan dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. (Kompas, 12 Februari 2009).
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggap wajar, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara yang masih buruk. Perbaikan yang sangat intensif atas tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah baru dilakukan setahun terakhir. Misalnya dalam setahun terakhir kami sudah berusaha sangat keras untuk memperbaikinya. Paling tidak untuk laporan keuangan Pemprov Sumut, kami sudah tepat waktu dan menata inventarisasi aset Pemprov Sumut (Medan, KOMPAS.com, 12 Juni 2009)
- BPK mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat memburuk karena dari 191 LKPD yang diperiksa, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*, sebanyak 8 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Solok belum memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, walaupun sudah dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Kemudian sistem akuntansi yang dibangun belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga sumber daya manusianya belum memiliki kapasitas yang bagus, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi berkualitas buruk.

Selain itu, rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

- b. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Hal ini terjadi karena teknologi informasinya (berupa perangkat keras, perangkat

lunak, jaringan dan sistem akuntansi) belum cukup serta belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna dan memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat dan tepat waktu.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

- a. Penelitian ini hanya dilakukan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, sehingga tidak menggambarkan semua objek Pemerintah Daerah. Yang artinya validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih rendah.
- b. Instrumen dan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desi Indriasari (2006). Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah melakukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan.
- c. Kurangnya sikap kepedulian dan keseriusan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Anugroho. 2008. *Sumber Daya Manusia*. Erlangga : Jakarta
- Anggraini. 2006. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daaerah Kota Semarang*. Tesis: Semarang
- Artikel. 2009. *Permasalahan Laporan Keuangan*. www.medan.kompas.com
- Artikel. 2009. *Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Menganggap Wajar Penilaian BPK Atas Laporan Keuangan Sumut Yang Dinilai Buruk*. www.kompas.com
- Artikel. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Memburuk*. www.kompas.com
- Artikel. 2008. *Pemda Tidak Mampu Menyusun Laporan Keuangan Jika Kurangnya Tenaga Akuntansi*. Detikfinance. www.yahoo.com
- Artikel. 2008. *Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah*. www.medan.kompas.com
- Artikel. 2008. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. www.mediaindonesia.com
- Artikel. 2008. *Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Masih Jauh Dari Baik*. www.kilasberita.com/amz/dtc
- Dharma. 2002. *Berbagai Aspek Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat : Jakarta
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Efraim Turban, et.al 2005. *Information Technologi for Management*. London
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.